PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pembimbing :
Dr. Ony Widilestariningtyas, SE., M.Si., Ak., CA

Oleh:
Shinta Pratiwi

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

This research was conducted at the Regional Work Units Cimahi .With the problems that occur are low budget absorption and many budget settles and the value of performance accountability of government agencies that badly. The purpose of this study is to analyze and assess how much influence the application of public sector accounting and performance-based budgeting to performance accountability of government agencies at the regional work units Cimahi.

Data analysis method used is descriptive analysis and verification. The population of as many as 25 SKPD with observation units Sub Division of Finance and Planning Program totaling 50 people. The sample used as many as 25 SKPD with observation units Sub Division of Finance and Planning Program totaling 50 people. The sampling technique used is sampling saturated. To determine the effect of the application of public sector accounting and performance-based budgeting to performance accountability of government agencies do statistical testing. Tools used statistical test is test-based strukturan equation variance or SEM Partial Least Square (PLS).

The results showed that the application of public sector accounting effect on performance accountability of government agencies and the effect on the performance-based budget performance accountability of government agencies and the regional work units Cimahi.

Keywords: Public Sector Accounting, Performance Based Budgeting, Government Agencies Performance Accountability

I. Pendahuluan

Prinsip tata kelola keuangan yang baik akan mempengaruhi kinerja pemerintah yang menyajikan atau yang membuat laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang baik didasarkan pada kinerja akuntabilitas yang menyampaikan serta membuat laporan keuangan tersebut. Berdasarkan peraturan perundangan berupa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab (Bambang Pamungkas , 2012).

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Maka semua instansi pemerintah, bagian atau lembaga negara di pusat

maupun daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000).

Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Proses penganggran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat (Sherillia, 2012).

Sekarang ini, dalam penggunaan anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seringkali tercermin dari kinerja organisasi sektor publik yang tergambar tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, dan miskin kreativitas. Kegemaran terhadap para pejabat instansi pemerintah daerah maupun pusat yang sering melakukan pemborosan, yang berakibat negara terbebani oleh pembiayaan yang meliputi tidak produktif, efektif, dan efisiensi kerja yang mana tentu berdampak pada rendahnya kinerja dan organisasi sektor publik baik pusat maupun daerah (Bahri, 2012).

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi Pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan di dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan *good governance* dapat diwujudkan oleh Pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah (Urip Santoso, 2008).

Berdasarkan uraian di atas serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **"Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah".**

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Cimahi.
2. Seberapa besar pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Cimahi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengungkapkan studi empiris mengenai pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna memecahkan masalah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Cimahi.

2. Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis
   Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan akuntansi sektor publik, anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Bagi SKPD Kota Cimahi
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah bagi instansi, terkait seperti Pemerintah Kota Cimahi dalam mengatasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang masih buruk.
3. Bagi Pihak Lain
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi, bahan rujukan dan referensi bagi pengembangan konsep tentang bagaimana pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

1.4.2 Kegunaan Akademis

Menurut Uma Sekaran (2006 : 10), kegunaan akademis adalah untuk kepentingan pengembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat berguna menerapkan kembali hasil penelitian terdahulu untuk memecahkan masalah spesifik yang terjadi pada penelitian tersebut.

Dari pengertian di atas, penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat dan dapat mengembangkan ilmu, dimana teori yang telah ada diuji kembali dalam penelitian ini dapat memperkuat teori yang telah ada yaitu akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi studi pustaka terhadap buku, artikel, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun tinjauan pustaka pada penelitian ini meliputi konsep mengenai penerapan akuntansi sektor publik, anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Indra Bastian (2010:3) akuntansi sektor publik adalah:

> "Mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta".

Sementara menurut Bachtiar Arif (2009:11) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai berikut:

> "Akuntansi sektor publik sering disebut Akuntansi Pemerintah, Akuntanis pemerintah itu sendiri adalah aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah kepada para pengguna berdasarkan proses

pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas info keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan".

Akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan Deddi Nordiawan (2008:3).

Dari Pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah Proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan keuangan yang diterapkan di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah yang berguna untuk pengambilan keputusan.

2.1.2 Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Indra Bastian (2006:171) pengertian anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) adalah:

" Sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi".

Sedangkan menurut Muhammad Syam Khusufi (2013:35) menjelaskan anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:

" Sistem anggaran yang lebih menekankan pada pendayagunaaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal".

Dan menurut Abdul Halim (2007:177) menjelaskan pengertian mengenai anggaran berbasis kinerja yaitu:

> " Metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efesiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja".

Maka dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem penganggaran yang lebih menekankan pendayagunaan dana yang akan dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efesiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

2.1.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2009:5) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

> "Dasar pelaporan keuangan di pemerintah yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan pemerintah".

Sedangkan menurut Indra Bastian (2010:88) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

> "Akuntabilitas berasal dari istilah bahasa inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas kinerja merupakan

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan atas semua aktivitas yang dilakukan".

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan atas semua aktivitas yang dilakukan pemerintah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dasar pelaporan keuangan di pemerintah yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan pemerintah (Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas berasal dari istilah bahasa inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas kinerja merupakan mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan atas semua aktivitas yang dilakukan (Indra Bastian, 2010).

Anggaran berbasis kinerja adalah Sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi (Indra Bastian, 2006). Metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efesiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja (Abdul Halim, 2007). Perencanaan anggaran berbasis kinerja merupakan suatu proses yang tidak pernah berakhir. Apabila sebuah perencanaan telah ditetapkan, maka dokumen menyangkut perencanaan terkait harus diimplementasikan (Indra Bastian, 2013).

Akuntansi sektor publik sering disebut Akuntansi Pemerintah, Akuntansi pemerintah itu sendiri adalah aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah kepada para pengguna berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas info keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan (Bachtiar Arif, 2009). Tujuan dari akuntansi pada organisasi sektor publik salah satunya adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengawasan manajemen (management pengawasan) (*American Accounting Association*, 2009).

2.2.1 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefesiensikan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit serta pertanggungjawaban publik (Indra Bastian, 2010).

Menurut penelitian Bambang Pamungkas (2012) dalam penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan dan kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengemukakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat berpengaruh baik secara parsial maupun simultan. Penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi pengingkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran.

Urip Santoso (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara teoritis Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik secara partial maupun secara bersama-sama. Oleh karena itu perlu pengkajian atas pelaksanaan praktis dari Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah apakah telah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sherillia (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penerapan Akuntansi Sektor Publik memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap akuntabilitas kinerja. Hal tersebut menunjukkan ketika semakin baik penerapan akuntansi sektor publiknya maka kinerjanya semakin dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan teori di atas, maka dapat dikatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntansi Sektor Publik yang baik akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.2.2 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi, penganggaran berbasis kinerja diterapkan untuk mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Keterkaitan antara penganggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilihat dalam pernyataan Indra Bastian (2006:54) bahwa:

> "Upaya untuk menciptakan pengelolaan anggaran berbasis kinerja diharapkan akan mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya".

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003) menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja:

> "Penerapan anggaran berbasis kinerja dapat diukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Agar terciptanya akuntabilitas dalam penerapan anggaran tersebut maka diperlukannya penerapan anggaran berbasis kinerja yang baik melalui beberapa faktor pendukung".

Sedangkan menurut Komang Sri Endrayani, dkk (2014) dalam penelitian penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengemukakan bahwa Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja untuk mendukung terciptanya akuntabilitas pada instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan otonomi dan desentralisasi dalam organisasi sektor publik harus memenuhi beberapa dimensi akuntabilitas. Dimensi-dimensi tersebut sangat berpengaruh terhadap suatu anggaran berbasis kinerja karena jika dalam melaksanakan berbasis kinerja dengan menaati dimensi akuntabilitas tersebut, maka instansi

pemerintah akan mampu menghasilkan kinerja secara optimal yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Menurut Yohanes (2011) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik anggaran berbasis kinerja maka akan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan teori-teori di atas, maka dapat dikatakan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Anggaran Berbasis Kinerja yang baik akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke tiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran. Menurut Sugiyono (2013:99) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalahpenelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikanbaru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesisjuga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalahpenelitian, belum jawaban yang empirik".

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan penulis. Untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi

H_2: Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi

III. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Pengertian objek penelitian yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012:38), menyatakan bahwa objek penelitian adalah sebagai berikut :

> "Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa objek penelitian merupakan sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Akuntansi Sektor Publik, Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu.

Metode penelitian menurut Sugiyono (2013:2) menyatakan bahwa:

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan carailmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu

pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah".

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan. Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data dapat dikumpulkan, dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan teori-teori yang telah dipelajari.

3.3 Desain Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu perencanaan dan perencanaan penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistimatis. Menurut Umi Narimawati (2010 : 30) desain penelitian adalah :

"Semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian".

Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu.

Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu.

Menurut Sugiyono (2008:13) dapat disimpulkan proses penelitian kuantitatif meliputi:

1. Sumber masalah
2. Rumusan masalah
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan
4. Pengajuan hipotesis
5. Metode penelitian
6. Menyusun instrumen penelitian
7. Kesimpulan

Berdasarkan proses penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka desain pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber masalah

   Membuat identifikasi masalah berdasarkan latar belakang penelitian sehingga mendapatkan judul sesuai dengan masalah yang ditemukan.

   Identifikasi masalah diperoleh dari adanya fenomena yang terjadi di masyarakat.

2. Rumusan masalah

   Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Proses penemuan masalah merupakan tahap penelitian yang paling sulit karena tujuan penelitian tidak dapat dilakukan dengan baik jika masalahnya tidak dirumuskan secara jelas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

   1. Seberapa besar penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kota Cimahi
   2. Seberapa besar penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kota Cimahi

3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan

   Untuk menjawab rumusan masalah yang sifatnya sementara (berhipotesis), maka peneliti mengkaji teori-teori yang relevan dengan masalah. Selain itu penemuan penelitian sebelumnya yang relevan juga digunakan sebagai bahan untuk memberikan jawaban

sementara terhadap masalah penelitian (hipotesis). Telaah teoritis mempunyai tujuan untuk menyusun kerangka teoritis yang menjadi dasar untuk menjawab masalah atau pertanyaan penelitian yang merupakan tahap penelitian dengan menguji terpenuhinya kriteria pengetahuan yang rasional.

4. Pengajuan hipotesis

Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru didasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang relevan, tetapi belum ada pembuktian secara empiris (faktual). Berikut hipotesa yang dirumuskan peneliti :

H.1 Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

H.2 Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. Metode penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan. Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data dapat dikumpulkan, dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan teori-teori yang telah dipelajari

6. Menyusun instrumen penelitian

Setelah metode penelitian yang sesuai dipilih, maka peneliti dapat menyusun instrumen penelitian. Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpul data. Instrumen pada penelitian ini berbentuk kuesioner, untuk pedoman wawancara atau observasi. Sebelum instrumen digunakan untuk pengumpulan data, maka instrumen penelitian harus terlebih dulu diuji validitas dan reabilitasnya. Dimana validitas digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah alat ukur dan reabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana pengukuran tersebut dapat dipercaya. Setalah data terkumpul maka selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik statistik tertentu. Selanjutnya peneliti menganalisis dan mengambil sampel untuk melakukan penelitian mengenai:

a. Untuk menganalisis pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
b. Untuk menganalisis pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

7. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban atas rumusan masalah. Dengan menekankan pada pemecahan masalah berupa informasi mengenai solusi masalah berupa informasi mengenai solusi masalah yang bermanfaat sebagai dasar untuk pembuatan keputusan.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel menurut Nur Indriantoro (2002) dalam Umi Narimawati (2010:31) adalah sebagai berikut:

> "Penentuan *construct* sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Defenisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan peneliti dalam mengoperasionalisasikan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengujuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik".

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian.

Variabel dalam konteks penelitian menurut Sugiyono (2013:63) adalah:

> "Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut,kemudian ditarik kesimpulannya".

Berdasarkan judul penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah:

1) Variabel bebas (*Independent*)
   Menurut Sugiyono (2013:64) menjelaskan bahwa:
   "Variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)".
   Variabel *independent* pada penelitian ini adalah Akuntansi Sektor Publik (X_1) dan Anggaran Berbasis Kinerja (X_2).
2) Variabel terikat (*dependent*)
   Menurut Sugiyono (2013:64) menjelaskan bahwa:
   "Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas".
   Variabel *dependent* dalam hal ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

3.5 Sumber Data

Sumber data dapat dibagi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2013:136) mendefinisikan sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

> "Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalkan dari pihak lain atau lewat dokumen".

Berdasarkan penjelasan diatas, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, karena peneliti mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan yang bersumber langsung dari objek pertama yang akan diteliti dengan menyebarkan kuesioner. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden. Responden dalam penelitian ini adalah 25 SKPD Kota Cimahi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan *(Library Reseach).* Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Penelitian lapangan (*Field Research*)

a) Kuesioner
   Menurut Umi Narimawati (2010:40) sebagai berikut:
   "Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 10itera seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya".
   Adapun kuesioner dilakukan kepada Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan dan Program pada setiap SKPD Kota Cimahi

b) Penelitian kepustakaan *(Library Research)*
   Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi 10iterature dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah 10iterature berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi

kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.7 Populasi dan Penarikan Sample

Untuk menunjang hasil penelitian, maka peneliti melakukan pengelompokan data yang diperlukan kedalam dua golongan, yaitu:

1) Populasi

Pengertian populasi menurut Umi Narimawati (2008:161) adalah sebagai berikut:

"Populasi adalah objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai informasi yang ditetapkan oleh peneliti, sebagai unit analisis penelitian".

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Cimahi sebanyak 25 SKPD.Unit observasi dalam penelitian ini adalah Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan dan Program SKPD Kota Cimahi yang berjumlah 50 orang.

2) Sample

Pengertian sampel menurut Umi Narimawati (2010:38) adalah sebagai berikut:

"Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian".

Dalam penelitian ini penulis melakukan penarikan sampel dengan menggunakan teknik sampling jenuh.

Menurut Sugiyono (2011:126) mengatakan bahwa :

"Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi yang digunakan sebagai sampel.Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil".

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Cimahi sebanyak 25 SKPD. Dengan unit observasi dalam penelitian ini adalah Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan dan Program SKPD Kota Cimahi yang berjumlah 50 orang.

3.8 Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya. Untuk melakukan pengujian dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi, cara ini telah mudah dibandingkan dengan menghitung seluruh anggota populasi. Setelah mendapatkan hasil statistik dari sampel, maka hasil tersebut dapat digunakan untuk menguji pernyataan populasi, apakah bukti empiris dari sampel mendukung atau menolak pernyataan mengenai populasi. Seluruh proses tersebut dikenal dengan pengujian hipotesis.

Menurut Suharyadi dan Purwanto S.K (2009:112) pengujian hipotesis didefinisikan sebagai berikut:

"Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karenanya harus ditolak".

Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini. Kedua hipotesis ini diuji dengan statistik uji t dengan ketentuan H_0 ditolak jika t_{hitung} lebih besar dari nilai kritis untuk $\alpha = 0,05$ sebesar 2,01.

1) Hipotesis 1

Hipotesis pertama adalah Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Persamaan model struktural:

$$\eta = \beta \xi_1 + \zeta$$

2) Hipotesis 2

Hipotesis kedua adalah Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Persamaan model struktural:

$$\eta = \gamma\xi_{2+}\zeta$$

Untuk menguji hipotesis kedua dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

H_o :γ = 0 : Pengaruh ξ_2 terhadap η tidak signifikan

H_1 :γ≠ 0 : Pengaruh ξ_2 terhadap η signifikan

Statistik uji yang digunakan adalah:

$$t = \frac{\lambda}{SE(\lambda)}$$

Tolak H_o jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana t_{tabel} untuk α = 0,05 sebesar 2,01.

3) Menggambarkan Daerah Penerimaan dan Penolakan

Untuk menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan terhadap sebuah hipotesis dapat digambarkan dengan uji dua pihak daerah penerimaan dan penolakan hipotesis.

Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis



Gambar 3.1
Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deskriptif

1) Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Penerapan akuntansi sektor publik yang diukur dengan menggunakan 3 indikator yang dioperasionalisasikan ke dalam 6 pernyataan. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai presentase tertinggi diperoleh sebesar 88,37% mengenai indikator pengikhtisaran, sedangkan nilai presentase terendah diperoleh indikator pelaporan sebesar 67,21%. Secara keseluruhan, dari variabel tersebut diketahui presentase yang diperoleh sebesar 77,67% tergolong kategori baik, terdapat *gap* sebesar 22,33%.

2) Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja yang diukur dengan menggunakan 8 indikator yang dioperasionalisasikan ke dalam 14 pernyataan. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai presentase tertinggi yang diperoleh sebesar 87,67% menngenai indikator implementasi, sedangkan nilai presentase terendah diperoleh indikator perencanaan strategi sebesar 66,28%. Secara keseluruhan, dari variabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang diperoleh sebesar 81,56%.

3) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diukur dengan menggunakan 3 indikator yang dioperasionalisasikan ke dalam 5 pernyataan. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai presentase tertinggi yang diperoleh sebesar 86,74% mengenai indikator *outcome*, sedangkan nilai presentase terendah diperoleh indikator efektifitas sebesar 66,05%. Secara keseluruhan, dari variabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang diperoleh sebesar 76,65%

4.1.2 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah adanya pengaruh dari penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Metode statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah *structural equation modelling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

Dalam *structural equation modeling* ada dua jenis model yang terbentuk, yakni model pengukuran (*outer model*) serta model struktural (*inner model*). *Outer model* ini menjelaskan proporsi varians setiap variabel manifes (indikator) yang dapat dijelaskan dalam variabel laten. Melalui outer model akan diketahui indikator mana saja yang dominan dalam pembentukkan variabel laten. Setelah model pengukuran pada setiap variabel laten diuraikan, selanjutnya diuraikan model struktural yang akan mengkaji pengaruh dari masing-masing variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen.

1) Koefisien Korelasi

a) Koefisien korelasi yang diperoleh antara akuntansi sektor publik dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebesar 0,640 termasuk dalam kategori hubungan yang kuat (*high correlation*) dikarenakan berada pada interval korelasi 0,60-0,799. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin baiknya akuntansi sektor publik akan berdampak pada semakin baiknya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
   Nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 7,176 lebih besar dari nilai t_{kritis} 2,01. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya hubungan positif yang kuat dan signifikan antara akuntansi sektor publik dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b) Koefisien korelasi yang diperoleh antara anggaran berbasis kinerjadengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebesar 0,710 termasuk dalam kategori hubungan yang kuat (*high correlation*) dikarenakan berada pada interval korelasi 0,60-0,799. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin baiknya anggaran berbasis kinerja akan berdampak pada semakin baiknya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
   Nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 7,986 lebih besar dari nilai t_{kritis} 2,01. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya hubungan positif yang kuat dan signifikan antara anggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2) Koefisien Determinasi

a) Akuntansi sektor publik memberikan kontribusi pengaruh sebesar 25,2% terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan rincian 15,5% merupakan pengaruh langsung dan sebanyak 9,7% sisanya merupakan besarnya pengaruh tidak langsung melalui anggaran berbasis kinerja.
b) Anggaran berbasis kinerja memberikan kontribusi pengaruh sebesar 37,3% terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan rincian 27,6% merupakan pengaruh langsung dan sebanyak 9,7% sisanya merupakan besarnya pengaruh tidak langsung melalui akuntansi sektor publik.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 7,176 nilai ini lebih besar dari t_{tabel} (2,01) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Cimahi.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penerapan akuntansi sektor publik memberikan kontribusi pengaruh sebesar 25,2% terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan rincian 15,5% merupakan pengaruh langsung yang berarti penerapan akuntansi sektor publik memberikan pengaruh tinggi arah positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Cimahi. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penerapan akuntansi sektor publik memberikan pengaruh sebesar 25,2% terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan rincian 15,5% merupakan pengaruh langsung sebanyak 9,7% sisanya merupakan besarnya pengaruh tidak langsung oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Kemudian berdasarkan hasil deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa penerapan akuntansi sektor publik mempunyai tanggapan responden dengan kategori baik. Hal ini dibuktikan oleh indikator yang paling tinggi tanggapan responden adalah pengikhtisaran dengan kategori sangat baik, selanjutnya indikator transaksi dengan kategori baik dan indikator dengan tanggapan responden paling rendah adalah pelaporan dengan kategori cukup baik. Selanjutnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mempunyai presentase tanggapan responden dengan kategori baik. Hal ini dibuktikan oleh indikator yang paling tinggi tanggapan responden adalah *outcome* dengan kategori sangat baik, selanjutnya indikator efisiensi dengan kategori baik dan indikator dengan tanggapan responden paling rendah adalah efektifitas dengan kategori cukup baik.

Koefisien Korelasi yang diperoleh antara akuntansi sektor publik dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukan hubungan yang terjadi adalah positif searah yang artinya semakin baiknya akuntansi sektor publik akan berdampak pada semakain baiknya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana penerapan akuntansi sektor publik yang baik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Cimahi.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan

mengefektifkan dan mengefesiensikan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit serta pertanggungjawaban publik (Indra Bastian, 2010).

Dan hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penerapan Akuntansi Sektor Publik memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap akuntabilitas kinerja. Hal tersebut menunjukkan ketika semakin baik penerapan akuntansi sektor publiknya maka kinerjanya semakin dapat dipertanggungjawabkan (Sherillia, 2015). Secara teoritis Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik secara partial maupun secara bersama-sama. Oleh karena itu perlu pengkajian atas pelaksanaan praktis dari Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah apakah telah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku (Urip Santoso, 2008).

4.2.2 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 7,986 nilai ini lebih besar dari t_{tabel} (2,01) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 2 signifikan. Artinya anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Cimahi.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, anggaran berbasis kinerja memberikan kontribusi pengaruh sebesar 37,3% terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan rincian 27,6% merupakan pengaruh langsung yang berarti anggaran berbasis kinerja memberikan pengaruh tinggi arah positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Cimahi. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa anggaran berbasis kinerja memberikan pengaruh sebesar 37,3% terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan rincian 27,6% merupakan pengaruh langsung sebanyak 9,7% sisanya merupakan besarnya pengaruh tidak langsung oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Kemudian berdasarkan hasil deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa anggaran berbasis kinerja mempunyai tanggapan responden dengan kategori baik. Hal ini dibuktikan oleh indikator yang paling tinggi tanggapan responden adalah implementasi dengan kategori sangat baik, selanjutnya indikator perumusan strategi dengan kategori sangat baik, indikator pelaporan dengan kategori sangat baik, indikator evaluasi kinerja dengan kategori sangat baik, indikator penyusunan program dengan kategori baik, indikator penganggaran dengan kategori baik, indikator umpan balik dengan kategori baik dan indikator dengan tanggapan responden paling rendah adalah perencanaan strategi dengan kategori cukup baik. Selanjutnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mempunyai presentase tanggapan responden dengan kategori baik. Hal ini dibuktikan oleh indikator yang paling tinggi tanggapan responden adalah *outcome* dengan kategori sangat baik, selanjutnya indikator efisiensi dengan kategori baik dan indikator dengan tanggapan responden paling rendah adalah efektivitas dengan kategori cukup baik.

Koefisien Korelasi yang diperoleh antara anggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukan hubungan yang terjadi adalah positif searah yang artinya semakin baiknya anggaran berbasis kinerja akan berdampak pada semakain baiknya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana anggaran berbasis

kinerja yang baik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Cimahi.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa upaya untuk menciptakan pengelolaan anggaran berbasis kinerja diharapkan akan mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya (Indra Bastian: 2006). Penerapan anggaran berbasis kinerja dapat diukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Agar terciptanya akuntabilitas dalam penerapan anggaran berbasis kinerja tersebut maka diperlukannya penerapan anggaran berbasis kinerja yang baik melalui beberapa faktor pendukung (Lembaga Administrasi Negara:2008).

Dan penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja untuk mendukung terciptanya akuntabilitas pada instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan otonomi dan desentralisasi dalam organisasi sektor publik harus memenuhi beberapa dimensi akuntabilitas. Dimensi-dimensi tersebut sangat berpengaruh terhadap suatu anggaran berbasis kinerja karena jika dalam melaksanakan berbasis kinerja dengan menaati dimensi akuntabilitas tersebut, maka instansi pemerintah akan mampu menghasilkan kinerja secara optimal yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Komang Sri Endrayani, dkk, 2014).

V. Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka peneliti mengambil simpulan sebagai berikut:

1) Akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Cimahi. Penerapan akuntansi sektor publik memiliki hubungan erat yang kuat terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin diterapkannya akuntansi sektor publik maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari hasil pengujian parsial dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki pengaruh signifikan.
2) Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Cimahi. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik anggaran berbasis kinerja maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari hasil pengujian parsial dapat disimpulkan bahwa variabel anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki pengaruh signifikan.

5.2 Saran

1) Untuk meningkatkan penerapan akuntansi sektor publik yang baik perlu meningkatkan jumlah pegawai yang profesional di bidang akuntansi serta mengadakan dan mengikuti pelatihan akuntansi dan perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyajian pelaporan keuangan dengan mencatat dan menulis transaksi yang terjadi harus dicatat sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
2) Untuk meningkatkan anggaran berbasis kinerja setiap SKPD Kota Cimahi perlu melakukan pengawasan terhadap anggaran berbasis kinerja agar pada setiap

penetapan APBD tidak terlambat. Penyusunan anggaran yang dibuat harus dilakukan dengan baik agar anggaran terserap dengan baik.

3) Dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu diadakan evaluasi kinerja pada SKPD setiap tahunnya, sehingga dapat diketahui baik atau buruknya kinerja setiap SKPD Kota Cimahi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPPN.

Abdul Halin. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat

Alwi Syarifudin. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif,* BPFE. Yogyakarta.

American Accounting Association (AAA), *Behavioral Research in Accounting*; Volume 9, 1997, Publishing By Accounting Behaviour & Organization of AAA *local government*, Management Accounting Research (2000).

Anggie Veronisa Claura. 2015. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* ISSN 2355-6854.

Azwar S. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bachtiar Arif. 2009*. Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit: Akademia.

Bahri Syambudi Prasetia 2012, *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon), Universitas Pasundan, Bandung.*

Bambang Pamungkas. 2012. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* Volume 12 Nomor 2.

Dedi Ismatullah. 2010. *Akuntansi Pemerintah*, Unit Penerbit dan Percetakan akademik, YPKN, Bandung.

Dedi Nordiawan. 2207. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat

Dedi Nordiawan 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Dita Angga Rusiana. 2015. *Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kejagung Paling Buruk*. Sindonews

Dyah Ratih Erwan. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial.* Yogyakarta: Gava Media.

Ellen Cristina. 2011. *Anggaran Perusahaan*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Gita Soraya, Rika, Cherrya. 2012. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja* ISSN 1978-1520.

Guilford, J.P. 1956. *Fundamental Statistics in Psychology and Education.* New York: McGraw Hall

Hendra Cipta.2011.*Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 1*, Jurnal Manajemen Kinerja. Tanah Datar.

Indra Bastian. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.

Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Publik: Suatu Pengantar.* Jakarta. Penerbit: Erlangga.

Indra Bastian. 2013. *Akuntansi Yayasan dan Sektor Publik*, Erlangga. Jakarta.

Intan Permata Haska Wina. 2012. *Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*

Imam Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPPS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.

Komang Sri Endrayani. 2014. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* Volume 2 Nomor 1.

LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta: Penerbit LAN.

Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mahmudi.2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press

Mangkunegara Prabu Anwar. 2010. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Eresco. Jakarta.

Mardiasmo. 2001. *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol 3. No. 2: 441-456.

Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit: Andi.

Meily Surianti. 2015. *The Implementation of Performance Based Budgeting In Public Sector* ISSN 2222-1697.

M. Nafarin. 2012. *Penganggaran Perusahaan*, Salemba Empat. Jakarta.

M. Subana Dan Sudrajat. 2005. *Dasar – Dasar Penelitian Ilmiah.* Bandung: CV Pustaka Pelajar.

Muhammad Syam Khusufi. 2013. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat. Jakarta.

Nur Indrianto dan Bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen.* Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Ririn Nur Febriani. 2015. *Percepat Serapan Anggaran SKPD Diminta Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja.* Pikiran Rakyat

Sherillia Septriane, Yon Nusdal. 2012. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja,* Jurnal Riset Akuntansi ISSN 2086-0447.

Srimindarti, Caecilian. 2009. *Balance Scorecard Sebagai Alternative Untuk Mengukur Kinerja*, Jurnal Forum Ekonomi Volume 11.

Subana Dan Sudrajat. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV Pustaka Pelajar

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharyadi dan Purwanto S.K. 2009. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Jilid 2*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tendi Haruman. 2010. *Penyusunan Anggaran Perusahaan*, Graha Ilmu. Yogyakarta.

Uce Indahyanti. 2013. *PPS-PLS*. Diakses pada tanggal 10 April 2015

Uma Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi.* Bandung: Agung Media.

Umi Narimawati dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis.

Urip Santoso, 2008. *Pengaruh Penerapan Akuntansi SektorPublik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud.* ISSN: 0216-1249.

Yohanes Y. Subiyantoro. 2011. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas*